

EVALUASI PROGRAM PENGEMUKAN SAPI DI KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH

Nanda Zunafriesma¹, Hasan Basri², Achmad Surya³

Abstrak

Melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 tahun 2013 dibentuk Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Program kawasan peternakan pengemukan sapi potong pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program pengemukan sapi di Ketapang Nusantara. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini meliputi Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Tengah, Kelompok Ternak Sapi di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, masyarakat dan stakeholders terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengemukan sapi dapat dikatakan belum efektif secara keseluruhan sebab pemenuhan kebutuhan daging masih pada wilayah Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan tujuan program berdasarkan peraturan yaitu pemenuhan kebutuhan daging sapi pada Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Disamping itu beberapa kendala yang dihadapi yaitu Faktor alam, belum mampu menyediakan padang rumput untuk memenuhi kuantitas pakan ternak, sebab beberapa wilayah memiliki kontur tanah yang dominan dengan bebatuan.. Faktor Perilaku SDM, lemahnya inovasi dan kreatifitas para peternak dalam mengelola peternakannya. Serta Faktor Komitmen Organisasi, lemahnya komitmen Dinas Pertanian dalam berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Rekomendasi yang dirumuskan diantaranya perlu adanya kemitraan dengan akademisi, ditingkatkannya koordinasi dengan instansi terkait program pengemukan sapi, serta perlu ada pencarian lokasi peternakan yang lebih mendukung.

Kata Kunci: Evaluasi, Program, Pengemukan, Sapi.

Abstract

Through the Qanun of Central Aceh Regency Number 6 of 2013, the Ketapang Nusantara Integrated City Area (KTM) was established in Linge District, Central Aceh Regency. Beef cattle fattening farm program in 2013. This study aims to evaluate the cattle fattening program in Ketapang Nusantara. This type of research is descriptive qualitative. The informants of this research include the Head of the Dians Animal Husbandry, Central Aceh Regency, Cattle Cattle Group in Linge District, Central Aceh Regency, the community and related stakeholders. The results showed that the cattle fattening program could be said to be ineffective as a whole because the fulfillment of meat needs was still in the district of Central Aceh, while the objective of the program was based on regulations, namely meeting the needs of beef in the Special Province of Aceh. Besides that, some of the obstacles faced are natural factors, not being able to provide pasture to meet the quantity of animal feed, because some areas have land contours that are dominant with rocks. Behavior factors of human resources, lack of innovation and creativity of breeders in managing their farms. As well as the Organizational Commitment Factor, the weak commitment of the Department of

^{1,2} Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Putih

³ Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Gajah Putih

Agriculture in coordinating and collaborating with related parties. The recommendations formulated include the need for partnerships with academics, improved coordination with agencies related to the cattle fattening program, and there needs to be a search for more supportive livestock locations.

Keywords: *Evaluation, Program, Fattening, Cattle*

PENDAHULUAN

Pengembangan kawasan peternakan merupakan salah satu sektor pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan nasional dengan tujuan percepatan pengembangan populasi dan produksi ternak unggulan daerah (sapi potong) dan jenis ternak lainnya. Pengembangan kawasan peternakan salah satu tujuannya yaitu menjaga ketersediaan komoditi daging dan program kecukupan daging Nasional 2010. (Hamdi, dkk, 2010) Antisipasi peningkatan *demand* terhadap komoditi peternakan (daging) dan stabilisasi harga daging. Oleh karena itu perlu pengembangan kawasan peternakan yang berkesinambungan. Dan pada pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program.

Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Muhadjir dalam Widodo mengemukakan “evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”.(Basri et al., 2022)

Evaluasi sendiri bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.(Akbar, 2016). Evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.(Apriliyanto, 2021), (Maesaroh; Widowati, 2021).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa pengelolaan sumberdaya hewan harus dilakukan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta

melindungi, mengamankan menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Peternakan adalah suatu kegiatan yang mengembangbiakan dan mumbudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

Ada beberapa wilayah pengembangan peternakan di Indonesia, salah satunya adalah Aceh. Aceh pada masa lalu dikenal sebagai daerah lumbung ternak di Indonesia, khususnya di Sumatera, sebelum terjadinya tsunami. Oleh karena itu, sangat tepat jika Pemerintah Pusat telah menetapkan bahwa Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mendapat prioritas untuk pengembangan ternak potong baik sapi maupun kerbau. Hal tersebut didukung pula oleh potensi wilayah yang dimiliki dan fasilitas yang tersedia.

Melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 tahun 2013 Pembentukan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di daerah Ketapang Nusantara, Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Terdapat dua wilayah kawasan KTM yang berada di Ketapang Nusantara. (Surya & Basri, 2020) Kecamatan Linge berada di wilayah kawasan II KTM Ketapang Nusantara, sekaligus merupakan salah satu kawasan pengembangan peternakan di Aceh Tengah dengan penetapan lokasi perencanaan di Kawasan Peternakan dengan seluas 650 Ha. Sementara di luar Kawasan Peternakan Terpadu, lahan dalam pengembangan peternakan tidak diberikan oleh pemerintah melainkan hanya mengandalkan lahan kosong dan hutan perbukitan. Tujuan diberlakukannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara Kabupaten Aceh Tengah yang didalamnya terdapat program penggemukan sapi potong yaitu : (a) mengoptimalkan potensi sumber daya alam; (b) mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru; (c) membuka peluang usaha dan kesempatan kerja; (d) menarik investor; (e) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kawasan KTM dan kampung-kampung sekitarnya.

Sejak diberlakukannya pengadaan sapi yang dilakukan Pemerintah, populasi sapi ternak di Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge pada tahun 2012 mencapai 1617 ekor. Namun dalam perkembangannya populasi sapi ternak dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pengurangan jumlah populasi ternak ini diakibatkan karena dijual, dicuri atau hilang hingga terdapat sapi yang mati. Bahkan hingga pendataan populasi sapi ternak pada akhir tahun 2016, jumlah yang tersisa hanya 416 ekor. Bahkan pada tahun 2016 terdapat 27,78 % populasi ternak yang mengalami kematian. Hal ini tentunya menjadi salah satu indikasi kurang efektifnya implementasi penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge.

Penelitian berdasarkan konsep teori yang diajukan sebagai pedoman pengkajian evaluasi program penggemukan sapi di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Berikut indikator evaluasi kegiatan;

- a) Efektifitas
 - 1) Pencapaian pemenuhan daging sapi di Kabupaten Aceh Tengah
 - 2) Mekanisme program penggemukan sapi.
- b) Kecukupan
 - 1) Ketersediaan kuantitas dan kualitas pakan terhadap jumlah ternak
 - 2) Kecukupan jaminan hidup bagi peternak
- c) Perataan
 - 1) Keadilan bantuan sarana dan prasarana
 - 2) Perataan penyaluran air bersih untuk kebutuhan ternak
- d) Responsivitas
 - 1) Daya tanggap pelaksana program penggemukan sapi
 - 2) Akses penyampaian informasi ke pelaksana program penggemukan sapi (sosialisasi)
- e) Ketepatan
 - 1) Ketepatan program penggemukan sapi dengan sumber daya yang tersedia
 - 2) Ketepatan program penggemukan sapi dengan karakteristik penduduk (Dunn:2003),(Youker et al., 2017),(Schoenefeld & Jordan, 2017)

Berdasarkan penjelesan dalam latar belakang di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Mengevaluasi program Penggemukan Sapi Di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah; 2) Mengidentifikasi penghambat keberhasilan Program Penggemukan Sapi Di

Ketapang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution dalam Sugiyono, 2013:54). Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu usaha pemecahan masalah dengan cara membandingkan gejala-gejala yang ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala-gejala, dan menetapkan pengaruh antara gejala-gejala yang ditemukan (Masri Singarimbun, 1989:87). Pendekatan metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui fenomena Pendekatan metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui fenomena evaluasi Program Penggemukan Sapi di Ketapang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

Informasi tidak dapat dibatasi baik jumlah maupun orangnya karena dalam penelitian ini ingin memperoleh informasi yang akurat maka digunakan juga teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2005:61) Artinya penentuan sampel berdasarkan dari tujuan utama penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya: 1) Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Tengah; 2) Kelompok Ternak Sapi di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah; 3) Masyarakat; 4) Pihak-pihak terkait (*Stakeholders*).

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis dilakukan setelah dikumpulkan data melalui wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka analisis data berproses secara induktif dikarenakan beberapa alasan. (Moleong, 2007:10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Penggemukan Sapi di Kabupaten Aceh Tengah

Kawasan KTM Ketapang Nusantara yang merupakan kawasan transmigrasi sebagian besar berada di Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget dimana seluruh kampong yang berada di Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget berawal dari UPT-UPT Transmigrasi yang sudah diserahkan kepada Pemda Kabupaten Aceh Tengah

sedangkan Kecamatan Linge sebagian besar merupakan kampung yang dihuni penduduk lokal atau kampung definitif.

Program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013 berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara Kabupaten Aceh Tengah. Program Pemerintah Aceh Tengah dalam meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka pengangguran di Aceh Tengah, salah satunya membuat suatu program yaitu “Meningkatkan Swasembada Daging Di Tahun 2014” dengan mengembangkan suatu peternakan di Desa Ketapang. Program swasembada daging 2014 yang di canangkan Pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negri secara mandiri dan berkelanjutan. Upaya mewujudkan swasembada daging tidak terlepas dari peran karakteristik petani peternak untuk menyiapkan pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengembangan budidaya ternak. Salah satu alasan mengapa swasembada daging menjadi penting adalah karena potensinya sebagai sumber pertumbuhan baru pada sektor Perternakan.

Identifikasi penghambat keberhasilan program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah

Kajian evaluasi kebijakan program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah diidentifikasi atas prinsip efektifitas, kecukupan, perataan, daya tanggap dan ketepatan.

1. Efektifitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2006:61).

Dalam evaluasi kebijakan publik program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah ini, indikator efektifitas terkait pada pemenuhan daging sapi dan mekanisme pengelolaan hewan ternak. Dalam konteks wilayah regional Kabupaten Aceh Tengah, pemenuhan daging sapi memang telah terpenuhi. Namun bila berdasarkan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kawasan Kota Terpadu

Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara Kabupaten Aceh Tengah, tujuan akan pemenuhan daging sapi untuk seluruh wilayah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh belum mampu terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa program belum mampu berjalan dengan efektif.

Cara penggemukan sapi yang paling efisien adalah penggemukan sapi yang dikurung di dalam kandang atau lazim disebut sistem kereman. Penggemukan dengan cara ini disamping dapat meningkatkan nilai jual sapi juga akan memberikan nilai tambah terhadap kotoran ternak atau pupuk kandang yang dihasilkan. Cara penggemukan sapi potong sistem kereman dilakukan dengan teknologi pemeliharaan sebagai berikut : a). Sapi dipelihara dalam kandang terus menerus dan tidak digembalakan. Ternak sapi hanya sewaktu-waktu dikeluarkan, yakni pada saat membersihkan kandang dan memandikan ternak sapi, b) Semua kebutuhan ternak, baik berupa pakan dan air minum disediakan oleh peternak secara tak terbatas, c) Cara penggemukan sistem ini mengutamakan pemberian pakan berupa campuran rumput, leguminosa dan makanan penguat, d) Sapi penggemukan tidak untuk dijadikan tenaga kerja, hal ini bertujuan agar makanan yang dikonsumsi sepenuhnya diubah menjadi daging dan lemak sehingga pertumbuhan bobot badan meningkat secara cepat.

- a. Pada awal masa penggemukan, ternak sapi terlebih dahulu diberikan obat cacing,
- b. Untuk meningkatkan palatabilitas/nafsu makan perlu diberikan perangsang nafsu makan dan vitamin,
- c. Lama penggemukan berkisar 4 – 10 bulan. Hal ini tergantung dari kondisi awal dan bobot sapi yang digemukkan.

Penyataan diatas berhubungan dengan aspek teknologi, suatu hal yang sangat penting juga diperhatikan oleh peternak dalam usaha penggemukan sapi potong adalah pemasaran.

2. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Perihal kecukupan dikaji berdasarkan kecukupan kualitas dan kuantitas pakan ternak serta kecukupan jaminan hidup untuk peternak.

Kecukupan kualitas dan kuantitas pakan ternak sesuai hasil penelitian belum mampu terpenuhi dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak semua wilayah di sekitar peternakan mampu menghasilkan rumput yang cukup untuk ketersediaan pakan ternak. Beberapa

wilayah mengalami kekeringan. Disamping itu adanya keterbatasan peternak dalam menyediakan konsentrat sebagai nutrisi tambahan untuk hewan ternak.

Tujuan pemberian pakan dalam suatu usaha penggemukan sapi potong adalah untuk memperoleh pertambahan bobot badan secara maksimal. Dengan demikian diperlukan pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan ternak baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Adapun syarat pakan ternak: a) Hendaknya cukup mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh yaitu : protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral, b) Disukai ternak (palatabilitas merupakan derajat kesukaan pada makanan tertentu yang terpilih dan dimakan dengan adanya respon yang diberikan oleh ternak baik rumanisia maupun mamalia, c) Bersih dan tidak tercemari kotoran atau bibit penyakit, d) Tidak boleh dalam keadaan rusak (busuk, bercendawan), e) Sebaiknya tidak mengandung benda-benda yang bersuhu rendah (misalnya embun pagi hari yang dapat menyebabkan sakit kembung/kejang perut pada ternak).

Selain itu indikator kecukupan ini juga dikaji mengenai jaminan hidup bagi para peternak. Dalam setiap bulannya, para peternak mendapatkan tambahan subsidi sebesar Rp 750.000,00. Hal ini merupakan tambahan operasional bagi para peternak. Nominal bantuan sebesar itu dianggap belum cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dikarenakan penjualan hewan ternak belum mampu rutin tiap bulannya. Dengan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa kecukupan belum mampu dipenuhi pada tahap evaluasi kebijakan publik program penggemukan sapi.

3. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. (Winarno, 2002).

Perataan ini meliputi keadilan bantuan sarana dan prasarana serta perataan kebutuhan air untuk hewan ternak. Sarana dan prasarana untuk kandang hewan ternak memang telah mampu disediakan sesuai dengan kuantitas hewannya. Artinya kandang ternak telah mampu

dipenuhi sesuai dengan layak dan sewajarnya. Namun mengenai ketersediaan air untuk hewan ternak, masih sering mengalami kendala. Hal ini dikarenakan sistem pengairan yang digunakan di peternakan masih menggunakan sistem pengairan konvensional. Dimana hanya mengandalkan ketersediaan air secara alami, jika musim kemarau berkepanjangan, maka banyak sumber air yang mengalami kekeringan. Belum ada alternatif pemerataan air bagi hewan ternak. Kendala ini juga sebagai bukti belum adanya sinergitas yang baik solid antar dinas dalam mendukung program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah.

Kedepan, padang penggembalaan harus selalu terpelihara dari kerusakan dan erosi. Untuk itu tata laksana penggembalaan harus dilakukan dengan baik. Sebelum digunakan, kapasitas tampung setiap areal padang penggembalaan harus ditentukan terlebih dahulu. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi tekanan penggembalaan yang berlebihan atau over grazing. Pada tempat-tempat tertentu di areal padang penggembalaan disediakan air minum yang bersih. Untuk menjaga agar sapi tidak kekurangan mineral maka pada tempat-tempat tertentu perlu pula disediakan lempengan-lempengan garam dapur atau mineral blok. Selain itu, areal padang penggembalaan sebaiknya ditanami pohon-pohon peneduh sebagai tempat berteduh untuk sapi, terutama pada waktu hari sedang panas. Pohon peneduh ini dapat berupa lamtoro atau gamal.

4. Daya tanggap

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. (Winarno, 2002),(Tibbitts et al., 2021).

Daya dukung dinas terkait belum berjalan dengan optimal. Belum adanya sinergitas yang terjalin antar pihak terkait. Seperti halnya daya dukung Dinas Cipta Karya yang belum bersinergi dalam hal membangun instalasi sistem pemerataan air sebagai antisipasi saat musim kemarau. Selain itu juga perlunya dukungan dari dinass atau stakeholders lainnya

sebagai fungsi pendampingan bagi para peternak. Pendampingan dalam peningkatan konsentrat penambahan nutrisi ternak. Selain itu pentingnya mengenai manajemen kesehatan ternak. Pengendalian penyakit sapi yang paling baik menjaga kesehatan sapi dengan tindakan pencegahan guna mencegah timbulnya penyakit yang dapat mengakibatkan kerugian. Tindakan pencegahan untuk menjaga kesehatan sapi adalah: a) Menjaga kebersihan kandang beserta peralatannya, termasuk memandikan sapi, b) Sapi yang sakit dipisahkan dengan sapi sehat dan segera dilakukan pengobatan, c) Mengusahkan lantai kandang selalu kering, d) Memeriksa kesehatan sapi secara teratur dan dilakukan vaksinasi sesuai petunjuk.

Pada dalam kondisi normal, sapi mendapatkan obat parasit saluran pencernaan dan vitamin pada awal pemeliharaan. Penanganan kesehatan ternak diarahkan juga pada kesehatan reproduksi, dan kesehatan secara umum. Ternak sapi perlu diberi obat cacing dan vitamin B kompleks serta kebersihan lingkungan.

5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. (Winarno, 2002)

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. (Dunn, 2003).

Program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah jika dikaitkan dengan karakteristik wilayah dan penduduknya dapat dinilai telah tepat. Karena pada wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki banyak ruang yang mampu digunakan sebagai lahan peternakan. Disamping itu karakteristik penduduk yang sebagian besar sebagai petani juga memiliki sinkronisasi pada bidang peternakan. Artinya pada perihal ketepatan, program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah ini mampu terpenuhi dengan baik.

Karakteristik peternak dapat menggambarkan keadaan peternak yang berhubungan dengan keterlibatannya dalam mengelola usaha ternak. Karakteristik peternak bisa mempengaruhi dalam hal mengadopsi suatu inovasi. Menurut Sumarwan (2004) Karakteristik peternak sebagai individu yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah faktor-faktor ini akan mempengaruhi respon peternak terhadap inovasi yang diperkenalkan. Simamora (2002) juga mengatakan bahwa karakteristik seseorang mempengaruhi cara dan kemampuan yang berbeda dalam bentuk persepsi, informasi apa yang diinginkan, bagaimana menginterpretasi informasi tersebut. Pedesaan mempunyai potensi yang besar dalam usaha peternakan dikarenakan kaya akan jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak tanpa harus membeli cukup mencari disekitar rumah atau menanam di lahan kosong. Hal ini bisa mengurangi biaya perawatan ternak, mereka cukup membeli pakan tambahan untuk mempercepat pertumbuhan serta kualitas sapi. Beternak sapi juga membawa keuntungan karena kotoran sapi bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang yang berfungsi sebagai penyubur tanah. Pemeliharaan ternak dilakukan bersama dalam satu tempat yang masing-masing anggota mempunyai 1-2 ekor sapi. Bila masing-masing peternak memelihara dengan tempat tersendiri akan sangat mempengaruhi kebersihan dan kesehatan lingkungan dan dilakukan dalam satu tempat agar pemeliharaan lebih terpadu.

Dari temuan beberapa kendala di atas, peneliti mengidentifikasi faktor penghambat sesuai pengamatan di lapangan. Diantaranya;

1. Faktor Alam

Kondisi alam yang belum mampu menyediakan pakan ternak sesuai dengan kebutuhan menjadi salah satu penyebab, terhambatnya program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah. Tidak semua wilayah peternakan memiliki wilayah padang rumput yang subur. Sehingga kebutuhan kuantitas pakan ternak juga belum mampu terpenuhi dengan baik.

Faktor alam juga berpengaruh terhadap perataan kebutuhan air untuk hewan. Tidak semua wilayah peternakan dekat dengan sumber air. Sehingga pada musim kemarau, beberapa wilayah peternakan kesulitan dalam mencari sumber air, sebagai pemenuhan kebutuhan hewan ternak.

Faktor alam juga menghambat atas akses sarana transportasi para peternak, maupun pihak-pihak terkait. Pada beberapa wilayah, jalan sebagai sarana transportasi darat tidak mendukung. Sebab masih berupa jalan tanah dan batu. Belum ada pengaspalan bahkan

hanya sekedar pengerasan sekalipun. Sehingga saat turun hujan lebat, wilayah peternakan hanya mampu dilewati oleh beberapa alat transportasi khusus saja.

2. Faktor Perilaku SDM

Perilaku SDM menjadi faktor penghambat selanjutnya, menurut pengamatan peneliti. Kurang terpenuhinya kebutuhan pakan ternak, akan dapat di atasi bilamana peternak atau pihak-pihak yang terlibat mampu memberikan inovasi dan kreatifitas dalam menemukan solusinya, Misalnya dengan memberikan konsentrat tambahan, yang dapat diramu sesuai dengan kebutuhan. Rumen yang terbuat dari tongkol jagung dapat dijadikan tambahan nutrisi pakan ternak. Sehingga peternak tidak hanya mengandalkan ketersediaan rumput segar yang ada di ladang.

Perihal permasalahan perataan air, perilaku SDM menurut pengamatan peneliti juga tidak mampu menunjukkan inovasi dan kreatifitasnya. Untuk mengatasi musim kemarau, peternak diharapkan mampu membangun sistem aliran air dari sumber air yang memiliki debit volume tinggi ke wilayah peternakan masing-masing. Sistem aliran air yang sederhana dapat dibentuk dengan potongan bambu-bambu yang dirangkai, sehingga mampu menjangkau ke wilayah peternakan masing-masing.

3. Faktor Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi yang rendah juga menjadi salah satu faktor penghambat sesuai dengan temuan di lapangan. Komitmen organisasi ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Misal, melakukan kerjasama dengan komponen akademisi dalam memberikan tambahan pengetahuan terkait pembuatan konsentrat pakan ternak, sebagai nutrisi tambahan untuk mengatasi terbatasnya rumput sebagai sumber makanan alami hewan ternak.

Metode penggemukan ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

1) Kelebihan

- a) Tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.
- b) Tidak membutuhkan banyak modal untuk membeli hijauan, konsentrat, serta kandang individu atau kandang khusus.
- c) Sapi yang digemukkan tidak perlu diberi kandang khusus. Namun, diperlukan beberapa buah bangunan yang berfungsi sebagai tempat berteduh dari hujan atau panas matahari.
- d) Biaya produksi murah, karena tidak membutuhkan dana untuk pembelian konsentrat

dan pembuatan kandang khusus atau individu.

2) Kekurangan

- a) Pertumbuhan sapi bakalan lambat, karena hanya diberi pakan hijauan.
- b) Membutuhkan lahan luas untuk penanaman hijauan atau padang penggembalaan.
- c) Hanya baik diterapkan di lokasi yang curah hujannya tinggi dan merata sepanjang tahun untuk menjamin ketersediaan hijauan.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan padang penggembalaan yang digunakan untuk penggemukan sapi dengan sistem pasture fattening adalah rotasi penggunaan padang penggembalaan. Satu areal padang penggembalaan dapat dibagi atas beberapa petak dan diisi dengan beberapa ekor sapi yang digemukkan. Setiap petak harus diamati terus agar dapat ditentukan saat yang tepat untuk melakukan rotasi.

Kendala belum meratanya air sebagai kebutuhan hewan ternak juga sebagai salah satu bukti rendahnya komitmen Dinas Pertanian yang belum mampu membangun kerjasama dengan pihak dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum setidaknya mampu memberikan solusi dengan membangun sistem aliran air yang lebih paten dan efektif guna mengatasi kekeringan di musim kemarau. Disamping masalah saluran air yang belum terbentuk, Dinas Pekerjaan Umum khususnya pada subdin Cipta Karya perlu ada komitmen kerjasama dalam memperbaiki akses sebagai sarana transportasi bagi para peternak atau pihak-pihak lainnya. Misal, dimulai dengan pengerasan jalan. Agar jalan yang dilalui tetap dapat ditempuh meski kondisi sedang hujan.

KESIMPULAN

Program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah telah berlangsung sejak tahun 2013. Adapun dasar pelaksanaannya yaitu Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara Kabupaten Aceh Tengah. Program penggemukan sapi dapat dikatakan belum efektif secara keseluruhan. Pada kecukupan jaminan hidup, para peternak masih mengeluhkan minimnya bantuan yang hanya sebesar Rp 750.00,00 per bulan. Pada faktor kecukupan, program penggemukan sapi dapat dikatakan belum terpenuhi baik untuk kualitas dan kuantitas pakan ternak serta jaminan hidup untuk peternak.

Faktor Penghambat Program penggemukan sapi di Kabupaten Aceh Tengah

1. Faktor alam, belum mampu menyediakan padang rumput untuk memenuhi kuantitas

pakan ternak.

2. Faktor Perilaku SDM, lemahnya inovasi dan kreatifitas para peternak dalam mengelola peternakannya, khususnya terkait penyediaan nutrisi tambahan ternak dan kebutuhan air untuk hewan ternak.

Faktor Komitmen Organisasi, lemahnya komitmen Dinas Pertanian dalam berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, guna bersama-sama mengatasi kendala yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287>
- Apriliyanto, A. P. (2021). Evaluasi Kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung Kabupaten Bandung. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 23–42. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11360>
- Basri, H., Budi, H., Teniro, A., Efendi, M., & Surya, A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Community Participation in Formulating. 13(1), 25–32.
- Debby D. V. Kawengian, Joyce Jacinta Rares. 2015. Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. e-journal “Acta Diurna” Volume IV. No.5. Tahun 2015
- Dunn, William N., 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjah mada University Press,
- Esti Hartiyanti Putri, Moch. Saleh Soeady, Ainul Hayat. 2013. Evaluasi Kebijakan Peremajaan Angkutan Kota Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.3, No.1, h. 87- 93
- Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang : YA3 Malang
- Hamdi Mayulu, Sunarso, C. Imam Sutrisno, dan Sumarsono. 2010. Kebijakan Pengembangan Peternakan Sapi Potong Di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 29

- (1), 2010 Islamy, Irfan, 2003, Prinsip-prinsip Perumusan kebijakan Negara, Jakarta, Bina Aksara
- I.T. Mulyo, S. Marzuki dan S. I. Santoso. 2012. Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Budidaya Sapi Potong Di Kabupaten Semarang. *Animal Agriculture Journal*, Vol. 1. No. 2, 2012, p 266 – 277
- Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Pertama . Cetakan Pertama. Yogyakarta, Penerbit Gaya Media.
- Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 119 Tahun 2004 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah
- Koentjaraningrat. 1985. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : Pustaka Jaya
- Maesaroh; Widowati, N. (2021). Efektivitas program joko tonggo di kelurahan wonotingal, kecamatan candisari kota semarang. *Dialogue: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 108–121. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/13055/6770>
- Moleong, Lexy J. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Wirawan, Bambang Satoro Haryono, Minto Hadi. 2013. Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 13, No. 1, Hal. 12-15
- Nugroho D., Riant. 2003, Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi), Jakarta, Gramedia
- Pasalong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung, Alfabeta
- Ratih Anggraeni, Soesilo Zauhar, Siswidiyanto. 2012. Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.1
- Schoenefeld, J., & Jordan, A. (2017). Governing policy evaluation? Towards a new typology. *Evaluation*, 23(3), 274–293. <https://doi.org/10.1177/1356389017715366>
- Singarimbun, Masri. 1989. Metode dan Proses Penelitian. Jakarta: LP3ES
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi., 2012. Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan sosial), Bandung, Alfabeta

- Surya, A., & Basri, H. (2020). EKSISTENSI SANKSI ADAT JERET NARU. 4, 359–368.
- Tibbitts, D. C., Aicher, S. A., Sugg, J., Handloser, K., Eisman, L., Booth, L. D., & Bradley, R. D. (2021). Program evaluation of trauma-informed yoga for vulnerable populations. *Evaluation and Program Planning*, 88(April 2020), 101946. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021.101946>
- Youker, B. W., Ford, K., & Bayer, N. (2017). Dismissing the goals: A comparison of four goal-dismissive goal-free evaluations. *Evaluation and Program Planning*, 64(May), 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2017.05.007>
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik (Proses dan Analisis)*., Jakarta, Intermedia
- Winarno, Budi., 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo,
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan